

Strategi Aktor Politik Baru dalam Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung 2016

Ni Wayan Puspawati¹⁾, I Ketut Putra Erawan²⁾, Bandiyah³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: puspawati.bdh@gmail.com¹⁾, ketut.erawan@ipd.or.id²⁾, dyah_3981@yahoo.co.id³⁾

ABSTRACT

The struggle of political actors has been viewed by various parties in fighting for the people of Klungkung Regency, especially the District of Nusa Penida. What is the strategy of new political actors in the development of infrastructure district Nusa Penida Klungkung district 2016. The theory used in the research is the theory of political elite, and Rational Choice where the method used is qualitative in obtaining interviews with sources. The results in the study there is a politics of repayment to klungkung mainland that only needs to be maintained Meanwhile, in Nusa Penida needs to be built because there is no decent development for the local community. Support from the central figure in Nusa Penida work together in developing development so that the positive impact where both parties mutually benefited in infrastructure development.

Keywords: Political actors, Regional Elites, Infrastructure development

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang diadakan serentak pada tahun 2013, Kabupaten Klungkung merupakan suatu daerah di Bali yang mengikuti kegiatan tersebut yang dilaksanakan secara aman dan lancar. Pada pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Klungkung dimenangkan oleh pasangan I Nyoman Suwirta dan wakilnya Mangku Kasta resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klungkung yang mengalahkan pasangan calon no urut 1. Tjokorde Bagus-Ida Bagus Adnyana, pasangan No 2. Anak Agung Anom-Regeg, pasangan no 3. Tjokorde Raka-Putu Tika.

Dalam hal ini posisi aktor politik dalam membangun pembangunan dibutuhkan peran yang terlibat dalam mengawasi dan menentukan faktor-faktor yang mendukung

aktor politik. Berdasarkan kenyataan di atas mendorong penulis untuk mencari tahu lebih dalam tentang strategi aktor politik dari kalangan partai baru, dari daerah yang dianggap sampai saat ini masih cukup tertinggal dan beliau hanya seorang pengusaha, namun memiliki strategi dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung 2016.

Maka dengan latar belakang di atas tersebut menjadikan ketertarikan peneliti untuk mengambil sebuah judul penelitian "Strategi Aktor Politik Baru dalam Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung 2016". Adapun nantinya penelitian ini diharap memberikan sumbangsih wawasan dan pengetahuan ke pada pihak yang membutuhkan data yang serupa dengan penelitian ini khususnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya perumusan masalah guna mengidentifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil dari penulis latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Aktor Politik Baru dalam Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung 2016?

2. Kajian Pustaka

2.1 Tinjauan Pustaka

Kajian tentang aktor politik baru dalam pembangunan melalui penelitian yang telah dikaji oleh beberapa penelitian, namun berbebeda dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian ini sebelumnya mempunyai perbedaan dari segi wilayah penelitian maupun aktor politik partai disebabkan karena runtuhnya sebuah rezim di Indonesia yang menyebabkan jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap elit politik tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini penulis ingin lebih jauh melihat penyebab faktor strategi aktor politik dalam kebijakan pembangunan. Adapun penelitian lain yang sudah dilakukan dapat digunakan sebagai acuan maupun refrensi dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang sudah ada, penulisan mengambil dua sampel penelitian dan dua buku sebagai sumber maupun tambahan refrensi penelitian.

Penelitian relevan dengan yang diteliti oleh peneliti, pertama dari jurnal penelitian M.

Zaenal Anwar dengan judul Peran Partai Politik Keadilan Sejahteran Kotamadya Yogyakarta dalam kebijakan publik.¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana aktor politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan dalam dan posisi yang sangat strategis, dimana peran tersebut dalam konteks formulasi aktor parpol dianggap biang penyebab kekacauan dalam proses kebijakan publik. Hal ini juga menjadi adanya kesalah pahaman terhadap peran partai politik sebagai instrument yang melancarkan proses kebijakan publik demokratik menjadi sering tertolak untuk dikatakan tidak ada atau minim. Tak jarang juga masyarakat berpendapat bahwa elit partai politik hanya menguntungkan diri mereka sehingga harapan masyarakat terhadap aktor politik sebuah janji semata.

2.2 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini membahas dan menjelaskan mengenai Strategi Aktor Politik Baru dalam Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung 2016. Sebagai arah tujuan penelitian ini, maka dari itu diperlukan adanya pemahaman terkait konsep yang akan dikaji pada penelitian ini. Dalam penjabaran konsep yang diteliti tentunya memiliki banyak pengertian yang berbeda-beda dari beberapa ahli, oleh karena itu peneliti hanya akan memaparkan penjelasan dari konsep yang berhubungan dan poin yang akan terkait dalam penelitian

¹ Anwar, *Peran Partai Politik Keadilan Sejahtera Kotamadya Yogyakarta dalam kebijakan publik*, jurnal Migister, (Yogyakarta : UI, 2008)

ini. Konsep yang terdapat dalam penelitian, yakni: Aktor Politik, Kebijakan, Pembangunan Daerah.

2.2.1 Elit Politik

Vilfredo Pareto (1848-1923) menggunakan kata elit untuk menjelaskan adanya ketidak setaraan dalam hal ini pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Dalam hal ini elit politik yang bisa menjangkau lebih dalam pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Lebih jauh, Pareto dalam membagi kelas elit kedalam dua kelas yaitu *pertama*, elit politik yang memerintah (*governing elit*) yang terdiri dari individu – individu yang secara langsung atau tidak langsung memainkan peranan penting yang besar dalam pemerintahan. *Kedua*, elit yang tak memerintah (*non- governing elit*). Jadi menurutnya, dalam masyarakat memiliki dua lapisan, lapisan yang rendah dan lapisan yang tinggi yang di bagi menjadi dua, elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah.

2.2.2 Kebijakan Publik

Richard Rose berupaya menyatakan dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikitnya kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.² Defenisi lain mengenai kebijakan publik ditawarkan oleh Carl Friedrich yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan

atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan yang mempersulit dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Bagaimanapun suatu kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Kalkulasi dari sebeluah rangkain kegiatan memiliki untung rugi dari sebuah keuntungan bagi individu atau kelompok, maupun kerugian dari suatu keputusan berdampak dari kebijakan yang dibuat.

2.2.3 Kalkulasi Elit Daerah

Kalkulasi diartikan perhitungan untung - rugi, kalkulasi lebih kepada proses maupun bentuk perhitungan rasional yang diambil dalam menentukan keputusan. Raymond Williams menyatakan elit dengan istilah "*the elect*" yang dimaknai anggota masyarakat yang terpilih, sebagai anggota dari masyarakat yang di nilai terbaik.³ Elit merupakan suatu kelompok individu yang menyatu satu sama lain memiliki kepentingan, nilai dan latar belakang yang hampir sama, berdasarkan kesamaan inilah mereka bersatu dan menanamkan solidaritas yang kuat dalam kelompok. Kelompok ini muncul berdasarkan asumsi bahwa hanya terdapat dua kelompok dari masyarakat yaitu yang memiliki kekuasaan dan yang tidak memiliki kekuasaan, maka

² Agustino.L, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. (Bandung : Alfabeta, 2014) hal.48

³ Josef Riwo Kaho & Cornelis Lay, *Politik Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bahan Kuliah, (Yogyakarta: PLOD UGM,2006), hlm.42

dari itulah elit muncul sebagai pembeda dari masyarakat, kelangsungan hidup dan keanggotannya berasal dari golongan terbatas atau eksekutif yang memungkinkan mereka kebal terhadap tuntutan dan gugatan dari orang lain tentang keputusan yang dibuat.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian Strategi Aktor politik baru dalam kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung 2016 adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif dengan perbandingan kasus. Menurut Bog dan Taylor, metode kualitatif adalah satu prosedur penelitian, data yang dihasilkan merupakan data deskriptif berupa kata – kata, makna dalam bentuk catatan – catatan, nilai, dan pengertian. Sedangkan, strategi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan kasus atau *comparative case* dengan perbandingan kasus peran aktor dalam kebijakan publik.⁴ Kasus yang dibandingkan adalah 2 kasus yang berbeda atau *diferent system method*. Penelitian ini ingin melihat secara mendalam bagaimana pertimbangan aktor politik terhadap kebijakan publik.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di satu tempat yaitu di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, waktu penelitian dialokasikan selama 2 bulan.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui teknik wawancara atau interview secara langsung dengan narasumber. Data sekunder dalam hal penelitian ini diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

3.4 Teknik Penentuan Responden dan analisis data

Responden adalah pihak yang merespon pertanyaan penelitian baik lisan maupun tertulis. Dalam menentukan responden peneliti menggunakan teknik *pusposive sampling*.⁵ Yaitu dengan mewawancarai pihak – pihak yang dipentingkan peran aktor politik implementasi dalam kebijakan publik. Masing-masing sudah barang tentu respondennya merupakan orang yang berkedudukan penting dalam struktur pemerintahan yang telah dibentuk.

Dengan demikian seorang peneliti kualitatif dalam memperoleh data yang diperlukan langsung terjun turun lapangan dengan metode kualitatif yang menggunakan pengamatan, wawancara

⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang sosial, budaya, filsafat, seni, agama, dan humaniora*, (Yogyakarta : Paradigma, 2012), hlm. 5

⁵ Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Alfabeta, 2009), hlm. 21

atau penelaahan dokumen di lokasi penelitian dalam kurun waktu lama sehingga akan memperoleh data yang valid dan lengkap. Dalam penelitian ini, informan akan dibagi menjadi tiga yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah beberapa orang relawan Komunitas Anak Alam. Informan utama yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah orang-orang terkena dampak keberadaan Komunitas Anak Alam, yakni orangtua dari anak yang dibantu Komunitas Anak Alam. Sedangkan informan tambahan dalam penelitian ini yakni kepala sekolah dan perbekel desa yang menjadi sasaran Komunitas Anak Alam.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Geografis Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung merupakan salah satu kabupaten diantara 8 Kabupaten dan Kota yang ada di Bali selain Denpasar, Badung, Buleleng, Jembrana, Tabanan, Gianyar, Bangli, dan Karangasem. Astronomi kabupaten Klungkung terletak diantara $115^{\circ} 21'28'' - 115^{\circ} 37'43''$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 27'37'' - 8^{\circ} 49'00''$ Lintang Selatan, dengan batas-batas. Sebelah Utara Kabupaten Bangli, sebelah Timur Kabupaten Karangasem, sebelah Barat Kabupaten Gianyar dan sebelah Selatan Samudra Hindia. Luas wilayah Kabupaten

Klungkung mencapai 315 Km^2 dan merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Bali. Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yaitu, Kecamatan Klungkung, Dawan, Banjarangkan, dan Nusa Penida. Adapun Kecamatan yang paling wilayahnya berpotensi adalah Nusa Penida dengan presentase wilayah 66, 48% dan Kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Klungkung dengan presentase wilayah 9, 22%.

4.2 Kinerja Pemerintah Daerah Klungkung 2016

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung 2016 memuat sasaran strategi, indikator dan target kinerja yang merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan Pembangunan dalam rangka pencapaian RPJMD maupun RKPD Kabupaten Klungkung. Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Klungkung 2016 berisikan perubahan upaya target dan anggaran dari induk yang sudah ditetapkan dan tercantum pada perjanjian kinerja pemerintah pada tahun 2016. Dalam hal ini terdapat perubahan dalam masa jabatan kepemimpinan sebelumnya terbukti dari kinerja Pemda dalam mengawasi pembangunan dan ekonomi Kabupaten Klungkung pada tahun 2016 dapat dilihat pada table diatas.

Pelaksanaan APBD Klungkung Tahun Anggaran 2016 masih dihadapkan pada kondisi dan tantangan yang sangat

berat dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Paradigma baru Pembangunan Daerah dilakukan semua lapisan masyarakat secara terpadu, serasi dan berkesinambungan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawas. Anggaran Daerah merupakan Anggaran Publik yang mencerminkan suatu Kebijakan Daerah dengan hasil pelaksanaannya bagi Pemerintah Daerah wajib untuk dipertanggung jawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel perhitungan APBD Kabupaten Klungkung Perhitungan APBD Kabupaten Klungkung dan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2016 di depan Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Klungkung.

Meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya *tour of duty* dan *tour of area*, penerapan *reward and funishment*, keterlambatan penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik. Bahkan dipihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya fluktuasi ekonomi makro dan mikro yang tidak menentu, ketidaksabaran masyarakat serta intervensi semua lembaga dalam pemeriksaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bertumpu pada waktu yang bersamaan.

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

a. Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan perundang-

undangan yang berbasis informasi dan teknologi (*sistem on line*) dengan memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro.

b. Pola kemitraan pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

c. Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.

d. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggung jawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen.

e. Pemenuhan kebutuhan sarana parasarana dalam penunjang sistem pelayanan Prima.

f. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang tanggungjawabnya serta penerapan *reward dan funishment* terhadap prestasi yang terukur.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah telah diupayakan agar segenap kemampuan Pemda, tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh didaerahnya, dan masyarakat sendiri sebagai peran penting dalam mengawasi setiap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sehingga sumber daya ekonomi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Tentunya disertai dengan suatu manajemen pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dan benar, berdaya guna dan berhasil guna. Perhitungan APBD merupakan tahap akhir dari pada siklus anggaran yang memuat data atau informasi

menyangkut realisasi pelaksanaan anggaran sekaligus berfungsi sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan program walaupun kondisi perekonomian masih belum optimal namun realisasinya Pendapatan Daerah berhasil melampaui target. Usaha meningkatkan penerimaan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah telah dilaksanakan berbagai upaya secara optimal sehingga realisasinya dapat melampaui target dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Nusa Penida pada tahun 2016.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung 2016 memuat sasaran strategi indikator dan target kinerja yang merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan Pembangunan dalam rangka pencapaian RPJMD maupun RKPD Kabupaten Klungkung. Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Klungkung 2016 berisikan perubahan upaya target dan anggaran dari induk yang sudah ditetapkan dan tercantum pada perjanjian kinerja pemerintah pada tahun 2016.

Pelaksanaan APBD Klungkung Tahun Anggaran 2016 masih dihadapkan pada kondisi dan tantangan yang sangat berat dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Paradigma baru Pembangunan Daerah dilakukan semua lapisan masyarakat secara terpadu, serasi dan berkesinambungan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawas. Anggaran Daerah merupakan

Anggaran Publik yang mencerminkan suatu Kebijakan Daerah dengan hasil pelaksanaannya bagi Pemerintah Daerah wajib untuk dipertanggung jawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel perhitungan APBD Kabupaten Klungkung Perhitungan APBD Kabupaten Klungkung dan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2016 di depan Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Klungkung.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Pemda berupayakan agar segenap kemampuan sumber daya ekonomi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Tentunya disertai dengan suatu manajemen pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dan benar, berdaya guna dan berhasil guna. Perhitungan APBD merupakan tahap akhir dari pada siklus anggaran yang memuat data atau informasi menyangkut realisasi pelaksanaan anggaran sekaligus berfungsi sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan program. Patut disyukuri bahwa walaupun kondisi perekonomian masih belum optimal namun realisasinya Pendapatan Daerah berhasil melampaui target. Usaha meningkatkan penerimaan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah telah dilaksanakan berbagai upaya secara optimal sehingga realisasinya dapat melampaui target. Dimana hal tersebut dilakukan dalam rangka menggenjot pembangunan daerah Kabupaten Klungkung yang seimbang sehingga tidak adanya ketimpangan pembangunan antara Klungkung daratan dan Nusa Penida

Salah satunya adalah pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dalam rangka mengimplementasikan demokrasi yang substantive di dalam bidang pemerintah. Kondisi perekonomian masih belum optimal namun realisasinya Pendapatan Daerah berhasil melampaui target. Usaha meningkatkan penerimaan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah telah dilaksanakan berbagai upaya secara optimal sehingga realisasinya dapat melampaui target. Dimana hal tersebut dilakukan dalam rangka menggenjot pembangunan daerah Kabupaten Klungkung yang seimbang sehingga tidak adanya ketimpangan pembangunan antara Klungkung daratan dan Nusa Penida

Birokrasi dalam pemerintahan saat ini terikat dengan budaya birokrasi masa lalu yang sangat patrimonial dan otoritarian. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan rendahnya berperilaku di kalangan birokrat dalam menyikapi potensi otonomi daerah.

4.3 Masyarakat Nusa Penida

Akibat munculnya isu politik deskriminasi menyebabkan munculnya rasa solidaritas masyarakat dalam mendukung I Nyoman Suwirta dalam kebijakan pembangunan Nusa Penida dalam menyeimbangi infrastruktur di daerah lainnya, rasa fanatisme yang berasal dari daerahnya yang deskriminasi ini, muncul sifat kedaerahan yang berimplikasi pada bersatunya pilihan masyarakat Nusa Penida untuk mendukung dan memilih pasangan I Nyoman Suwirta-Mangku Kasta pada Pemilu 2013. Pemerintah Kabupaten Klungkung mengupayakan

komitmen politik yang cukup kuat dalam hal pembangunan infrastruktur secara merata di wilayah Nusa Penida, sebagaimana terlihat dari strategi kebijakan pembangunan infrastruktur dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2013-2016. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut di optimalkan, namun masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain kendala dana yang masih sangat terbatas, khususnya untuk pengembangan infrastruktur transportasi, masih menyulitkan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan kebijakan strategis yang dibuatnya, termasuk dalam upaya menarik minat investasi di wilayah selatan Kabupaten Klungkung yang terkendala bukan hanya oleh minimnya fasilitas infrastruktur, potensi kemajua Nusa Penida berpotensi meningkatkan APBDN Kabupaten Klungkung.

4.4 Pengaruh Tokoh Masyarakat

Dalam pembangunan Kabupaten Klungkung terutama Nusa Penida tidak lepas dari untung rugi dari aktor politik maupun jaringan kontribusi elit politik daerah dan elit pengusaha lokal yang berperan signifikan dalam pembangunan Nusa Penida, Hal ini menjadi kontribusi utama Kabupaten Klungkung. Elit lokal menempati posisi yang strategis dalam kontribusi membangun dan mengawasi setiap pembangunan infrastruktur di Nusa Penida. Perluasan jaringan elit lokal inilah yang meningkatkan Nusa Penida menjadi kecamatan yang lebih maju dalam melakukan trobosan untuk menggejot terutama pembangunan infrastruktur di Nusa Penida yang selama ini mengalami

ketertinggalan di bandingkan dengan Klungkung di daratan.

Strategi perluasan jaringan kepercayaan elit lokal di Nusa Penida pada dasarnya elit pengusaha yang memiliki pengaruh dalam memperjuangkan kesejahteraan penduduk Nusa Penida yang merupakan penyumbang APBD klungkung hingga 70% yang bersumber dari pariwisata. Kepercayaan masyarakat terhadap I Nyoman Suwirta tidak semata-mata beliau berasal dari Nusa Ceningan Kecamatan Nusa Penida respon dari tokoh ternama seperti I Wayan Setar dan I Nyoman Nurada mendukung penuh keputusan pemerintah daerah demi membangun infrastruktur tidak terlepas dari isu diskriminasi dari lawan politik I Nyoman Suwirta tokoh dan masyarakat setempat mendukung penuh kebijakan dalam membangun pembangunan infrastruktur di Nusa Penida.

4.5 Analisis Temuan

Penulis melakukan analisis penelitian berdasarkan temuan penelitian yang diperkuat dengan konsep dan teori. Penulis telah membagi tahapan analisis dalam beberapa bagian yaitu, aktor politik baru yang berasal dari partai yang bisa dikatakan baru yakni Partai Gerindra yang terjun dalam dunia politik pada Tahun 2008. Di mana Kabupaten Klungkung mendominasi partai di Kabupaten Klungkung merupakan partai PDI-P namun hal itu tidak menjadi opsi utama masyarakat dalam kemenangan I Nyoman Suwirta melainkan visi-misi dalam strategi pembangunan infrastruktur yang merata

terutama di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

Masyarakat Klungkung menyadari dalam menentukan pilihan berdasarkan figur dirasa jauh lebih penting untuk dinilai sebagai pilihan dalam membangun pembangunan infrastruktur yang sejahtera bagi masyarakat dibandingkan partai politik yang mengusung, walaupun masih terdapat juga masyarakat yang memilih berdasarkan partai tertentu. Selain penilaian dari partai politik, tidak adanya dukungan dari puri klungkung tidak menjadi permasalahan bagi I Nyoman Suwirta dalam membangun pembangunan yang layak bagi masyarakat Kabupaten Klungkung. Penulis juga mendapatkan bahwa isu politik mengenai diskriminasi terhadap I Nyoman Suwirta yang sebagai panjak (pelayan\ budak) di Puri Klungkung dulunya yang menyebabkan tidak layak memangku jabatan sebagai Bupati Klungkung pada saat Pemilihan Kepala Daerah 2013-2018.

Pendukung dalam pembangunan infrastruktur Nusa Penida tidak lepas dari jaringan elit pengusaha dan elit politik, karena sebelum I Nyoman Suwirta menjabat sebagai Bupati Klungkung beliau merupakan penggegas dan tokoh sentral selama 27 tahun di KOPPAS SRINADI Klungkung dan memiliki 14 ribu anggota, pekerja dan karyawan. Menjabat sebagai direktur Koperasi Srinadi pada Tahun 1987 sampai 2013 dengan pengabdian dan kesabaran membuktikan pemimpin yang bertanggung jawab, sehingga memiliki dukungan penuh dalam pemilukada 2013 dan melepas jabatan namun beliau di

percaya sebagai penasehat di KOPPAS SRINADI.

Strategi dalam membangun Nusa Penida tidak dipungkiri terlibatnya jaringan koprasri srinadi membantu masyarakat dalam bangkit dalam perekonomian membuktikan beliau sukses dalam membangun perekonomian Kabupaten Klungkung dengan menerima tanda kehormatan dan penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden RI, Joko Widodo. Penghargaan diserahkan langsung ke pada Bupati Suwirta pada peringatan Hari Koprasri Nasional ke-70 di Lapangan Kerobosi, Makasar, Sulawesi Selatan pada hari Rabu (12 juli 2017). Penghargaan ini diterima Bupati I Nyoman Suwirta atas jasa beliau yang telah berhasil dalam pembangunan Koprasri dan UKM melalui Program Gerakan "*Gema Santhi*" dengan ini keberhasilan dalam pembangunan dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Klungkung. Membatasi Mini Market dan lebih memajukan pedagang atau usaha kecil itu terbukti dengan jumlah Mini Market yang berada di Nusa Penida yang tidak adanya Super Mareket melainkan pedagang dan pasar tradisional yang mendominasi di Nusa Penida

Dengan adanya pembangunan infrastruktur mulai dari jalan dan bangunan yang layak, pemerintahan I Nyoman Suwirta mengajak elit pengusaha menengah dan kebawah bekerja sama untuk memajukan dalam bidang pariwisata dengan mengadakan festival pekan raya di Nusa Penida, dengan begitu Nusa Penida mendapatkan promosi dengan wisatanya

yang indah. Respon dari dukungan tersebut mendapatkan dukungan penuh dari tokoh yang memiliki peran penting di Nusa Penida khususnya ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru mendukung penuh keputusan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, tidak terlepas dari pengawasan dari DPRD Klungkung.

Dalam teori rasional chois *Barbara Gadges* dalam pilihan tidak secara kolektif, prinsip moral menekankan kalkulasi untung dan rugi yang harus dikeluarkan termasuk resikonya. Kepercayaan masyarakat terhadap I Nyoman Suwirta tidak semata-mata beliau berasal dari Nusa Ceningan Kecamatan Nusa Penida respon dari tokoh ternama seperti I Wayan Setar dan I Nyoman Nurada mendukung penuh keputusan pemerintah daerah demi membangun infrastruktur sebagai penunjang fasilitas yang memadai. Tidak terlepas dari isu diskriminasi dari lawan politik I Nyoman Suwirta, tokoh dan masyarakat setempat mendukung penuh kebijakan dalam membangun pembangunan infrastruktur di Nusa Penida. Anggaran daerah Meningkatkan di sertai Kualitas Arah Pembangunan Daerah sesuai BAPPEDA mengalami 70% di tahun 2016.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur mulai dari jalan dan bangunan yang layak, pemerintahan I Nyoman Suwirta mengajak elit pengusaha menengah dan kebawah bekerja sama untuk memajukan dalam bidang pariwisata dengan mengadakan festival pekan raya di Nusa Penida, dengan begitu Nusa Penida

mendapatkan promosi dengan wisatanya yang indah. Respon dari dukungan tersebut mendapatkan dukungan penuh dari tokoh yang memiliki peran penting di Nusa Penida khususnya ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru mendukung penuh keputusan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, tidak terlepas dari pengawasan dari DPRD Klungkung.

Dalam teori rasional chois *Barbara Gades* dalam pilihan tidak secara kolektif, prinsip moral menekankan kalkulasi untung dan rugi yang harus dikeluarkan termasuk resikonya. Kepercayaan masyarakat terhadap I Nyoman Suwirta tidak semata-mata beliau berasal dari Nusa Ceningan Kecamatan Nusa Penida respon dari tokoh ternama seperti I Wayan Setar dan I Nyoman Nurada mendukung penuh keputusan pemerintah daerah demi membangun infrastruktur sebagai penunjang fasilitas yang memadai. Tidak terlepas dari isu diskriminasi dari lawan politik I Nyoman Suwirta, tokoh dan masyarakat setempat mendukung penuh kebijakan dalam membangun pembangunan infrastruktur di Nusa Penida. Anggaran daerah Meningkat di sertai Kualitas Arah Pembangunan Daerah sesuai BAPPEDA mengalami 70% di tahun 2016.

Nusa Penida merupakan daerah pemilihan berpotensi bagi para politisi sehingga tidak mungkin politisi tidak mempertimbangkan hak pilih Nusa Penida dalam mengumpulkan hak suara pada pemilu. SDM dengan jumlah penduduk dan jumlah wilayah, untuk Klungkung daratan

2/3 ada di Nusa Penida 1/3 ada di daratan dan dari jumlah penduduk dibandingkan dengan 3 kecamatan kecil. Potensi dari sisi kesiapan masyarakat Nusa Penida cukup antusias terkait dengan suasana atau menerima pembangunan yang diharapkan bagi warga setempat. Program Pemda selanjutnya untuk kedepan adalah pembangunan jalan lingkar, masih dalam masuk kajian pemerintah daerah, dan masuk dalam perencanaan APBD.

Kalkulasi tersebut bukan hanya bertujuan untuk mengangkat citra aktor politik namun rasa membangun dalam mensejahterakan dan semangat yang tinggi (jengah) dari I Nyoman Suwirta terhadap kurangnya perhatian Pemda dan Pemerintah Pusat mendorong keinginan dalam membuat perubahan bagi masyarakat sekian tahunnya. Dengan adanya isu Diskriminasi aktor politik membuat strategi pembangunan infrastruktur meningkat secara signifikan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam setiap tahunnya secara signifikan.

5. Kesimpulan

Strategi yang digunakan aktor politik dalam membangun pembangunan infrastruktur terutama di Kecamatan Nusa Penida melalui beberapa hal yang penulis temukan di lapangan. Dalam teori rasional chois *Barbara Gades* dalam pilihan tidak secara kolektif, prinsip moral menekankan pengorbanan untung dan rugi yang harus dikeluarkan termasuk resikonya. Kepercayaan masyarakat

terhadap I Nyoman Suwirta tidak semata - mata beliau berasal dari Nusa Ceningan Kecamatan Nusa Penida respon dari tokoh ternama seperti I Wayan Setar dan I Nyoman Nurada mendukung penuh keputusan pemerintah daerah demi membangun infrastruktur. Tidak terlepas dari isu diskriminasi dari lawan politik I Nyoman Suwirta tokoh dan masyarakat setempat mendukung penuh kebijakan dalam membangun pembangunan infrastruktur di Nusa Penida..Tidak itu saja aggaran daerah Meningkatnya Kualitas Arah Pembangunan Daerah sesuai BAPPEDA mengalami 100% di tahun 2016 pada tahun sebelumnya.

Dalam hal ini partai Gerindra diuntungkan dengan aktor yang mempertahankan kualitas aktor dan memiliki daya Tarik sendiri di masyarakat Klungkung dan Nusa Penida, Dalam hal ini dijelaskan bahwa strategi pembangunan akan membuat program yang diharakan oleh masyarakat karena Nusa Penida adalah daerah pemilih yang potensial. Program tersebut diharapkan menjadi balas budi bagi masyarakat Nusa Penida supaya masyarakat Nusa Penida melihat pemimpin yang berasal dari Gerindra berpihak kepada Nusa Penida dan memberikan dampak yang signifikan. Strategi ini terbukti ampuh mengalahkan

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Agustino, L.(2014). *Politik lokal dan otonomi daerah*. Bandung : Alfabeta

Barbara Geddes,(1994). *"Politician's Dilemma, Building State Capacity in*

pertahan dan partai penguasa dengan berhasil merebut jabatan eksekutif dan legislatif.

Prioritas Nusa Penida adalah pembangunan infrastruktur hal ini berbeda dengan klungkung daratan yang hanya melakukan perataan, pembenahan dan pengolaan saja. Hal ini merupakan program yang di canangkan oleh bupati suwirta yang notabeneanya dari nusa penida. hal ini dilakukan untuk memberikan rasa puas terhadap masyarakat nusa penida yang merupakan daerah pemuliahan dan daerah asalnya bupati suwirta. Dengan demikian citra politik bupati klungkung akan terangkat dan masyarakat tanpa ragu akan memilih bupati suwirta pada periode yang kedua pada pilkada serentak pada tahun 2018.

Balas budi tersebut bukan hanya bertujuan untuk mengangkat citra namun rasa memiliki dan rasa jengah dari I Nyoman Suwirta terhadap penderitaan masyarakat sekian tahunnya. Isu Deskriminasi beliau membuat strategi kebijakan pembangunan infrastruktur yang layak setiap tahunnya meningkat secara signifikan dan pendukung dari tokoh ternama di Nusa Penida pun ikut mendukung keputusan pemerintah daerah.

Latin America", Barkeley: University of California Press

Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Ketiga*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Keempat*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Kelima*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah. (2007). *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kaelan, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta:Paradigma
- Satori. Djam'an dan Aan Komariah, (2009), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung; ALFABETA
- Roger F. Soltau. (1961). *An Introduction to Politics Longmans*. London; Green And Co.
- Republik Indonesia. 2002. *Undang – undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Fungsi Partai Politik*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Varma, SP. (2010). *Teori Politik Modern*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Warjio. (2016). *Politik Pembangunan : Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Jakarta: Kencana.
- Jumari. 2012. "Peran elit dan basis sosial partai demokrat dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010". Jakarta.Universitas Indonesia.
- Anwar.2008. "Peran Politik Partai Keadilan Sejahtera Kotamadya Yogyakarta Dalam Kebijakan Publik. Jakarta . Universitas Indonesia.
- Silfitriana.2016. "Evaluasi Kebijakan Sitem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di Kabupaten Gowa. Makasar. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Josef Riwu Kaho & Cornelis Lay, *Politik Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bahan Kuliah, (Yogyakarta: PLOD UGM,2006)

Sumber Internet:

- <http://www.kpu-klungkungkab.go.id/index.php/detailb ankdata/?act=folder&i=21>, diakses 15 Desember 2016 pukul 20:34 WITA
- <http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=5105&idmenu=info&idsub=1>, diakses 15 Desember 2016 pukul 21:21 WITA
- Peran partai politik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat* (Link diunduh dari<http://ejournal.unsrat.ac.id>, pada 20 Desember 2017, pukul 18.30)
- bali.tribunnews.com/topics/kasus-korupsi-mantan-bupati-klungkung, diakses pada tanggal 11 januari 2017,pukul 20.14
- <http://www.kpu-klungkungkab.go.id/index.php/detailb ankdata/?act=folder&i=21>, diakses 15 Desember 2016 pukul 20:34 WITA